

PERAN PEMERINTAH DALAM UPAYA MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS PADI DI JAWA BARAT

THE ROLE OF GOVERNMENT IN EFFORTS TO IMPROVE RICE PRODUCTIVITY IN WEST JAVA

ELLY RASMIKAYATI¹, ENDAH DJUWENDAH¹, BOBBY RACHMAT SAEFUDIN^{2*}

¹Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran

²Fakultas Pertanian, Universitas Ma'soem

*E-mail corresponding: bobirachmat@gmail.com

ABSTRAK

Produksi padi di Jawa Barat harus senantiasa ditingkatkan mengingat kebutuhan pangan yang semakin meningkat, namun dalam dua tahun terakhir ini produksi padi Jawa Barat mengalami penurunan. Subsistem penunjang usahatani padi diantaranya dukungan pemerintah menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan produksi padi, namun peran dan dukungan yang diberikan kepada petani oleh pemerintah belum sepenuhnya maksimal, selain itu terdapat kecenderungan bahwa beda daerah akan berbeda pula kapasitas dukungan pemerintahnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan produktivitas padi dan dukungan pemerintah di beberapa daerah di sentra produksi di Jawa Barat dan menganalisis pengaruh dukungan pemerintah terhadap produktivitas padi di Jawa Barat. Metode penelitian ini menggunakan metode survei. Penelitian ini menggunakan teknik sampling acak kluster sedemikian sehingga didapatkan sampel berukuran 281 petani di 5 cluster kabupaten di Jawa Barat. Alat analisis data yang digunakan adalah statistika deskriptif dan uji regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kabupaten dengan rata-rata produktivitas padi tertinggi dan terendah berturut-turut adalah Karawang (6,88 ton/ha) dan Sukabumi (5,34 ton/ha). Dukungan pemerintah berupa penyuluhan, regulasi, sarana dan prasarana budidaya padi, dukungan modal usahatani dan dukungan fasilitas kelitbangan penerapannya pada petani di berbagai daerah bervariasi, ada yang sudah bisa dirasakan oleh petani dan ada yang belum. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa dukungan regulasi, sarana dan prasarana budidaya padi, dan fasilitas kelitbangan berpengaruh nyata terhadap produktivitas padi di Jawa Barat.

Kata Kunci: Dukungan pemerintah, regulasi, penyuluhan, modal, litbang, produktivitas, usahatani padi

ABSTRACT

Rice production in West Java must be continuously increased considering the increasing need for food, but in the last 2 years, West Java's rice production has decreased. The supporting subsystems of rice farming, including government support, are one of the important factors in increasing rice production, but the role and support given to farmers by the government have not been fully maximized, in addition there is a tendency that different regions will have different capacities of government support. This study aims to describe rice productivity and government support in several areas in production centers in West Java and to analyze the effect of government support on rice productivity in West Java. This research method uses a survey method. This study using cluster random sampling technique with sample size of 281 farmers from 5 district clusters in West Java. The data analysis tools used are descriptive statistics and regression tests. The results of the study showed that the districts with the highest and lowest average rice productivity were Karawang (6.88 tons/ha) and Sukabumi (5.34 tons/ha), respectively. Government support in the form of extension support, regulations, facilities and infrastructure for rice cultivation, support for farming capital and support for research and development facilities for their application by farmers varies, some can already be felt by farmers and some have not yet been felt. Regression test resulted that the support of regulatory, rice cultivation facilities and infrastructure, and R&D facilities had a significant effect on rice productivity in West Java.

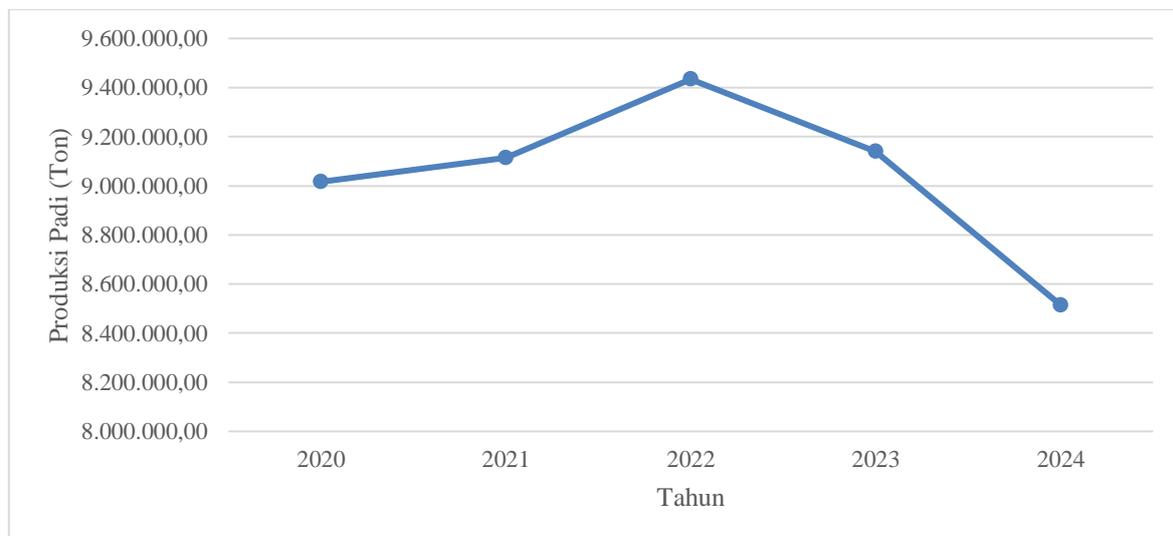
Keywords: Government support, regulation, extension, capital, research and development, productivity, rice farming

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara agraris dengan mayoritas masyarakat menjadikan nasi sebagai makanan pokok, nasi berasal dari tanaman padi. Jawa Barat merupakan salah satu pusat produksi padi di Indonesia. Seiring dengan permintaan masyarakat Indonesia yang menjadi nasi sebagai makanan pokok, permintaan terhadap padi terus menerus meningkat yang seharusnya diimbangi oleh produksi padi di Indonesia.

Gambar 1 menunjukkan bahwa produksi padi di Jawa Barat sempat mengalami peningkatan dengan rata-rata

laju peningkatan sebesar 2,29% per tahun selama 3 tahun dari tahun 2020-2022. Namun, dalam 2 tahun terakhir yaitu tahun 2023 dan 2024, produksi padi Jawa Barat mengalami penurunan dengan rata-rata laju penurunan sebesar hampir 5% per tahun. Menurut penelitian Prakoso et al. (2023) produktivitas, kemudahan dalam menjual, dan keuntungan dari menjual hasil panen yang tinggi membuat petani masih memiliki persepsi yang tinggi. Hal inilah yang membuat petani masih mempertahankan dan mengoperasikan usahatani.



Gambar 1. Trend Produksi Padi Jawa Barat Tahun 2020-2024

Sumber: Data BPS, 2024 (diolah)

Produktivitas tersebut tidak terlepas dari dukungan pemerintah. Melalui regulasi dan kebijakannya, pemerintah Indonesia membuat program-program yang mendukung usahatani padi di Jawa Barat

seperti program subsidi pupuk, benih, dan penyuluhan atau pelatihan teknis. Dukungan tersebut menjadi dukungan yang relevan bagi petani dalam menjalankan keberlangsung usahatani. Kebijakan pemerintah, seperti

subsidi input pertanian dan akses ke kredit, secara signifikan berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas padi. Misalnya, program pemerintah yang memberikan dukungan input bagi petani terbukti meningkatkan intensitas tanam serta hasil produksi padi. Studi di Indonesia mengonfirmasi bahwa akses kredit pertanian yang diberikan melalui program subsidi suku bunga atau skema penjaminan kredit telah meningkatkan produktivitas padi secara substansial (Wicaksono, 2014).

Dukungan modal sangat diperlukan oleh petani dalam keberlangsungannya menjalankan usahatani. Akses modal diperlukan petani untuk pengadaan input-input produksi seperti pupuk, benih, pengendalian opt, sewa lahan, dan input produksi lainnya. Petani membutuhkan dukungan kredit yang inklusif dari pra-tanam hingga pasca-panen dan pemasaran untuk meningkatkan kinerja usahatani. Dukungan dari pemerintah untuk memperkuat lembaga keuangan lokal dan menghubungkannya dengan sumber dana diperlukan untuk mendukung petani skala kecil (Pasaribu et al., 2021).

Subsistem penunjang usahatani padi diantaranya dukungan pemerintah menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan produksi padi, namun peran dan dukungan yang diberikan kepada petani

oleh pemerintah belum sepenuhnya maksimal. Pada tingkat akar rumput petani masih menghadapi berbagai tantangan dan kendala, seperti akses kredit yang sulit diakses oleh petani kecil, yang sering terjadi karena persyaratan administrasi yang tidak mendukung. Ketersediaan sumber permodalan yang dapat diakses oleh petani masih sangat terbatas, sehingga pembelian input usahatani padi terkadang disesuaikan dengan modal sendiri yang tersedia. Hal ini berakibat kepada pencapaian produksi usahatani padi yang kurang maksimal (Mulyaqin et al., 2016). Faktor-faktor seperti irigasi, infrastruktur pertanian, dan dukungan pemerintah lainnya menjadi indikator penting dalam keberlanjutan usahatani padi (Jakiyah et al., 2016). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan produktivitas padi dan dukungan pemerintah di beberapa daerah di sentra produksi di Jawa Barat dan menganalisis pengaruh dukungan pemerintah terhadap produktivitas padi di Jawa Barat.

METODE PENELITIAN

1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode survey. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer didapat menggunakan alat kuesioner yang merupakan teknik pengumpulan data yang

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Santoso, 2018). Sedangkan data sekunder didapat dari BPS dan hasil penelitian-penelitian sebelumnya dengan topik terkait.

2. Populasi dan Sampel

Pada penelitian ini yang menjadi populasi adalah petani padi di Jawa Barat. Teknik sampling yang digunakan adalah teknik sampling acak kluster sedemikian sehingga didapatkan ukuran sampel sebanyak 281 petani padi di 5 kluster Jawa Barat yaitu kabupaten Sukabumi, Tasikmalaya, Bekasi, Karawang, Indramayu dan Bandung.

3. Variabel Penelitian

Variabel adalah karakteristik yang paling sedikit mempunyai dua nilai yang berbeda (Rasmikayati, 2017). Adapun variabel dalam penelitian ini yaitu:

- Dukungan Pemerintah:
 - Regulasi
 - Sarana dan Prasarana Budidaya Padi
 - Modal Usahatani
 - Fasilitas Kelitbangan oleh Lembaga Litbang dan Perguruan Tinggi
 - Penyuluhan
- Produktivitas padi (Ton/hektar)

4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif dan regresi linier. Metode statistika

deskriptif yang digunakan berupa ukuran gejala pusat dan dispersi dan tabulasi silang yang digunakan untuk mendeskripsikan setiap variabel yang diteliti dalam penelitian ini. Regresi Linier digunakan untuk mengidentifikasi pengaruh variabel independen yaitu dukungan pemerintah terhadap variabel dependen yaitu produktivitas padi. Variabel independen yang berskala ordinal ditransformasi terlebih dahulu menjadi variabel berskala interval menggunakan metode *successive interval* kemudian dilakukan pengujian dengan regresi linier berganda menggunakan alat bantu berupa *software* SPSS versi 26.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi Produktivitas Petani Padi

Produktivitas padi adalah jumlah panen gabah kering panen (GKP) dibagi luas lahan petani. Berdasarkan Tabel 1, secara umum untuk seluruh petani sampel (Jawa Barat), produktivitas padi petani bervariasi pada rentang 3 – 13,67 ton/ha dengan nilai rata-ratanya sebesar 6,02 ton/ha. Nilai produktivitas tertinggi terjadi pada petani di kabupaten Karawang dengan nilai produktivitas padi mencapai 13,67 ton/ha, sedangkan yang terendah terjadi di kabupaten Sukabumi dengan produktivitas padi sebesar 3 ton/ha. Urutan nilai rata-rata

produktivitas padi per kabupaten dari yang terendah hingga yang tertinggi secara berturut-turut adalah kabupaten Sukabumi, Bekasi, Tasikmalaya, Bandung, Indramayu, dan Karawang. Hal yang menarik jika memperhatikan nilai simpangan baku produktivitas padi per kabupaten, Tasikmalaya dan Karawang memiliki nilai simpangan baku diatas 3 ton/ha yang berarti

bahwa produktivitas padi tiap petaninya lebih bervariasi dari kabupaten lainnya. Sementara kabupaten lain produktivitas padi tiap petaninya cenderung lebih homogen. Dukungan pemerintah sangat diperlukan untuk lebih menstabilkan produktivitas petani sehingga diharapkan produktivitas padi tiap petani yang masih kecil dapat ditingkatkan.

Tabel 1. Deskripsi Produktivitas Padi Petani

Ukuran Statistik	Kabupaten						Total
	Sukabumi	Tasikmalaya	Bekasi	Karawang	Indramayu	Bandung	
n (Orang)	44	50	47	54	45	41	281
Rata-rata (Ton/Ha)	5,34	5,81	5,41	6,88	6,51	6,01	6,02
Simp. Baku (Ton/ Ha)	1,78	3,12	1,90	3,14	1,82	2,26	2,49
Minimum (Ton/Ha)	3,00	3,80	3,00	4,71	4,00	3,06	3,00
Maksimum (Ton/Ha)	9,50	7,86	10,00	13,67	11,00	13,46	13,67

Sumber: Analisis Data Primer (2024)

2. Deskripsi Persepsi Petani Terkait Dukungan Pemerintah

Dukungan pemerintah merupakan dukungan berupa program bantu, kebijakan, dan intervensi yang diberikan oleh pemerintah melalui regulasi yang mengikat pada individu, kelompok, atau sektor-sektor

tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam penelitian ini, indikator dari dukungan pemerintah terdiri dari: 1) regulasi; 2) sarana dan prasaran; 3) modal usahatani; 4) fasilitas kelitbangan; dan 5) penyuluhan.

Tabel 2. Deskripsi Persepsi Petani terhadap Dukungan Regulasi Pemerintah

Kabupaten	Dukungan Regulasi										Total (Orang)	Frekuensi (%)
	Sangat buruk		Buruk		Cukup baik		Baik		Sangat baik			
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
Sukabumi	0	0	44	26	0	0	0	0	0	0	44	16
Tasikmalaya	7	50	18	11	15	21	10	40	0	0	50	18
Bekasi	3	21	44	26	0	0	0	0	0	0	47	17
Karawang	0	0	21	12	22	30	11	44	0	0	54	19
Indramayu	4	29	41	24	0	0	0	0	0	0	45	16
Bandung	0	0	1	1	36	49	4	16	0	0	41	15
Total	14	100	169	100	73	100	25	100	0	0	281	100

Sumber: Analisis Data Primer (2024)

Berdasarkan Tabel 2, terkait dukungan pemerintah mengenai dukungan

regulasi atau peraturan, secara umum masih belum dirasakan oleh mayoritas petani padi.

Setidaknya 65% petani menilai bahwa dukungan regulasi dari pemerintah buruk dan sangat buruk. Namun jika dilihat per kabupaten, terjadi penerapan regulasi yang lebih baik di daerah Karawang, Bandung, dan Tasikmalaya dibandingkan kabupaten lainnya. Pada ketiga daerah tersebut setidaknya 50% petani menilai dukungan regulasi sudah cukup baik hingga sangat baik, bahkan di Kabupaten Bandung sudah mencapai 98% petani menilai dukungan regulasi ini sudah cukup baik hingga sangat baik. Sementara semua petani di kabupaten Sukabumi, Bekasi, dan Indramayu menilai dukungan regulasi masih buruk hingga

sangat buruk. Kebijakan pemerintah daerah memainkan peran penting dalam mendukung pertanian, ekonomi, dan pembangunan wilayah. Misalnya, dukungan kebijakan dalam hal pembiayaan, pengelolaan lahan, serta infrastruktur agrikultur sangat penting untuk meningkatkan produktivitas daerah (Pasaribu et al., 2021). Efektivitas regulasi menunjukkan bahwa penerapan regulasi yang terfokus dapat membawa manfaat dalam hal efisiensi dan keberlanjutan jangka panjang, terutama dalam sektor pertanian (Setiyanto et al., 2021).

Tabel 3. Deskripsi Persepsi Petani terhadap Dukungan Sarana dan Prasarana Budidaya Padi

Kabupaten	Dukungan Sarana dan Prasarana Budidaya Padi										Total (Orang)	Frekuensi (%)
	Sangat buruk		Buruk		Cukup baik		Baik		Sangat baik			
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
Sukabumi	0	0	44	29	0	0	0	0	0	0	44	16
Tasikmalaya	8	30	0	0	5	10	35	73	2	100	50	18
Bekasi	4	15	42	27	0	0	1	2	0	0	47	17
Karawang	8	30	19	12	22	43	5	10	0	0	54	19
Indramayu	3	11	41	27	1	2	0	0	0	0	45	16
Bandung	4	15	7	5	23	45	7	15	0	0	41	15
Total	27	100	153	100	51	100	48	100	2	100	281	100

Sumber: Analisis Data Primer (2024)

Kemudian berdasarkan Tabel 3, dukungan pemerintah mengenai sarana dan prasarana budidaya padi, mayoritas petani (64%) masih belum merasakannya, mereka menilai dukungan pemerintah tersebut masih buruk hingga sangat buruk. Ditinjau per kabupaten, dukungan pemerintah terkait sarana dan prasarana budidaya padi sudah berjalan di daerah Karawang, Bandung, dan

Tasikmalaya dibandingkan kabupaten lainnya. Pada ketiga daerah tersebut setidaknya 50% petani menilai dukungan sarana dan prasarana budidaya padi sudah cukup baik hingga sangat baik, bahkan di Kabupaten Tasikmalaya dan Bandung sudah lebih dari 70% petani menilai dukungan regulasi ini sudah cukup baik hingga sangat baik. Sementara hampir

semua petani di kabupaten Sukabumi, Bekasi, dan Indramayu menilai dukungan regulasi masih buruk hingga sangat buruk. Dampak infrastruktur pertanian terhadap produksi padi di Jawa Barat, serta bagaimana infrastruktur seperti mesin pertanian dan jaringan irigasi berperan dalam mendukung produksi padi (Jamil & Chairunnisya, 2023). Hal ini berbeda dengan penelitian tersebut, dalam penerapan infrastruktur yang merupakan sarana dan prasarana pertanian yang mendukung terhadap hasil produksi padi. Sedangkan di, Jawa Barat beberapa daerah memiliki dukungan sarana dan prasarana yang kurang relevan. Di sisi lain, dukungan dari pemerintah sangat diperlukan dalam menyediakan benih berkualitas dan menyebarkan informasi terkait keunggulan varietas baru (Ali et al., 2021).

Kemudian berdasarkan Tabel 4, terkait dukungan modal dari pemerintah, mayoritas petani (76%) masih belum merasakannya, mereka menilai dukungan pemerintah tersebut masih buruk hingga

sangat buruk. Ditinjau per kabupaten, dukungan modal dari pemerintah hanya dirasakan oleh mayoritas petani di daerah Karawang saja, mereka menilai dukungan modal dari pemerintah sudah cukup baik hingga sangat baik (64%). Sementara mayoritas petani di kabupaten lainnya menilai dukungan regulasi masih buruk hingga sangat buruk. Relevansi dukungan modal usahatani harus disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan oleh petani. Selain itu pemerataan dukungan modal perlu didistribusikan secara merata. Menurut penelitian Jamil & Chairunnisya (2023) modal usahatani berperan penting dalam meningkatkan kapasitas petani untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi lingkungan dan pasar. Setiyanto et al. (2021) dalam penelitiannya juga menyebutkan bahwa dukungan modal dan infrastruktur melalui program ini sangat penting untuk meningkatkan daya saing global usahatani padi, terutama melalui alokasi modal yang tepat.

Tabel 4. Deskripsi Persepsi Petani terhadap Dukungan Modal dari Pemerintah

Kabupaten	Dukungan Modal dari Pemerintah										Total (Orang)	Frekuensi (%)
	Sangat buruk		Buruk		Cukup baik		Baik		Sangat baik			
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
Sukabumi	6	9	36	24	2	7	0	0	0	0	44	16
Tasikmalaya	16	24	2	1	10	36	11	39	11	100	50	18
Bekasi	6	9	39	26	2	7	0	0	0	0	47	17
Karawang	17	26	14	9	9	32	14	50	0	0	54	19
Indramayu	3	5	41	28	1	4	0	0	0	0	45	16
Bandung	18	27	16	11	4	14	3	11	0	0	41	15
Total	66	100	148	100	28	100	28	100	11	100	281	100

Sumber: Analisis Data Primer (2024)

Kemudian mengenai dukungan kelitbangan, berdasarkan Tabel 5, hampir 82% dari seluruh petani menilai bahwa fasilitas kelitbangan dari pemerintah masih buruh hingga sangat buruk. Hal ini juga terjadi di semua kabupaten, mayoritas petani di semua kabupaten belum merasakan dampak yang positif dari peran litbang dari pemerintah maupun dari perguruan tinggi. Namun demikian ada sekitar 20 – 34% petani di Bekasi, Karawang dan Bandung menilai kinerja yang cukup baik hingga baik dari peran lembaga litbang pemerintah. Peran dari hasil penelitian dari lembaga litbang ini harus terus ditingkatkan sehingga tersampaikan dan dirasakan oleh para

petani. Fasilitas kelitbangan dan infrastruktur pendukung memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi energi dan produktivitas di sektor hortikultura. Ini relevan dalam konteks bagaimana fasilitas kelitbangan dapat meningkatkan produktivitas pertanian melalui inovasi teknologi (Kuswardhani et al., 2014). Penelitian serupa yang menyebutkan pentingnya kelitbangan dikemukakan oleh Liesdiana et al. (2019), fasilitas kelitbangan dan infrastruktur penelitian sangat penting dalam mendukung pengembangan dan penyebaran teknologi seperti SRI untuk meningkatkan produktivitas padi di wilayah tersebut.

Tabel 5. Deskripsi Persepsi Petani terhadap Dukungan Kelitbangan

Kabupaten	Dukungan Kelitbangan										Total (Orang)	Frekuensi (%)
	Sangat buruk		Buruk		Cukup baik		Baik		Sangat baik			
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
Sukabumi	3	3	37	28	3	8	1	8	0	0	44	16
Tasikmalaya	47	47	2	2	1	3	0	0	0	0	50	18
Bekasi	5	5	29	22	3	8	10	77	0	0	47	17
Karawang	20	20	16	12	18	47	0	0	0	0	54	19
Indramayu	3	3	41	31	1	3	0	0	0	0	45	16
Bandung	21	21	6	5	12	32	2	15	0	0	41	15
Total	99	100	131	100	38	100	13	100	0	0	281	100

Sumber: Analisis Data Primer (2024)

Sementara itu untuk dukungan pemerinyah terkait penyuluhan, berdasarkan Tabel 6 hal tersebut sudah berjalan dengan baik. Mayoritas petani (83%) menilai peran penyuluhan sudah cukup baik hingga sangat baik. Mayoritas petani di tiap kabupaten menilai dukungan

penyuluhan dari pemerintah kepada petani padi sudah berjalan dengan baik dalam keberlangsungannya menjalankan usaha-tani padi. Terutama bagi para petani padi di Sukabumi, Bekasi dan Indramayu dimana hampir semua petani dari tiap daerah tersebut sudah merasakan dukungan yang

cukup baik hingga sangat baik terkait penyuluhan yang diberikan oleh lembaga pemerintah. menurut Maryani et al. (2017), penyuluhan berbasis partisipasi yang

melibatkan peningkatan interaksi antara penyuluh dan petani sangat efektif dalam meningkatkan kemampuan petani dan partisipasi mereka.

Tabel 6. Deskripsi Persepsi Petani terhadap Dukungan Penyuluhan

Kabupaten	Dukungan Penyuluhan										Total (Orang)	Frekuensi (%)
	Sangat buruk		Buruk		Cukup baik		Baik		Sangat baik			
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
Sukabumi	0	0	0	0	0	0	41	24	3	10	44	16
Tasikmalaya	5	19	7	33	4	11	17	10	17	59	50	18
Bekasi	0	0	1	5	0	0	44	26	2	7	47	17
Karawang	11	41	8	38	7	20	28	17	0	0	54	19
Indramayu	0	0	1	5	0	0	37	22	7	24	45	16
Bandung	11	41	4	19	24	69	2	1	0	0	41	15
Total	27	100	21	100	35	100	169	100	29	100	281	100

Sumber: Analisis Data Primer (2024)

3. Pengaruh Dukungan Pemerintah terhadap Peningkatan Produktivitas Padi

Hasil uji regresi berganda pada Tabel 7 menunjukkan nilai koefisien determinasi sebesar 0,126 atau 12,6% yang artinya bahwa semua indikator dari dukungan pemerintah yaitu dukungan regulasi, sarana dan prasarana, modal

usahatani, kelitbangan dan penyuluhan secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi naik turunnya nilai produktivitas padi sebesar 12,8%, sementara sisanya sebesar 87,2% dijelaskan oleh faktor lainnya. Nilai tersebut dinilai wajar karena dukungan pemerintah memang merupakan salah satu unsur penunjang dari agribisnis padi sehingga.

Tabel 7. Pengaruh Dukungan Pemerintah terhadap Produktivitas Padi

Variabel Bebas Dukungan Pemerintah	Koefisien Regresi (β_i)	Nilai t	Tingkat Signifikansi	Status
Konstanta	3,348	5,538	0,000	Signifikan***
1. Regulasi	1,924	2,844	0,005	Signifikan***
2. Sarana dan Prasarana	2,522	4,270	0,000	Signifikan***
3. Modal Usahatani	0,130	0,272	0,786	Tidak signifikan
4. Dukungan Kelitbangan	1,636	3,467	0,001	Signifikan***
5. Penyuluhan	0,563	1,421	0,157	Tidak signifikan

$$R^2 = 0,126$$

Ket: ***) Signifikan dengan taraf nyata 1%

Sumber: Analisis Data Primer (2024)

Kemudian secara parsial terdapat 3 indikator dari dukungan pemerintah yaitu

dukungan regulasi, dukungan sarana dan prasarana dan dukungan kelitbangan yang

berpengaruh signifikan dan positif terhadap produktivitas padi di tingkat populasi (Jawa Barat) pada taraf nyata 1%. Sedangkan 2 indikator lainnya dari dukungan pemerintah yaitu dukungan modal usahatani dan dukungan penyuluhan tidak berpengaruh terhadap produktivitas padi.

Hal ini mengungkapkan bahwa untuk meningkatkan produktivitas padi di Jawa Barat maka pemerintah harus berfokus terutama pada peningkatan peran dari ke-3 indikator yang signifikan tersebut. Sebagaimana dalam pembahasan sebelumnya telah ditunjukkan bahwa dukungan dari ke-3 indikator tersebut masih belum merata dan dapat ditingkatkan lagi perannya. Contoh dari peningkatan dukungan tersebut menurut Alvin & Arifin (2023), dukungan pemerintah dapat meningkatkan akses pembiayaan yang pada akhirnya berdampak pada produktivitas usaha. Sementara terdapat hasil yang serupa yang terjadi pada penelitian di sektor perikanan dan rumput laut bahwa dukungan dari pemerintah daerah dan lembaga keuangan seperti Bank BUMN dapat meningkatkan produktivitas sektor perikanan dan rumput laut di wilayah perbatasan. Dukungan dalam bentuk penyediaan modal dan teknologi menjadi kunci keberhasilan dalam meningkatkan

skala usaha perikanan dan pertanian di daerah terpencil (Shafitri et al., 2020).

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kabupaten dengan rata-rata produktivitas padi tertinggi dan terendah berturut-turut adalah Karawang (6,88 ton/ha) dan Sukabumi (5,34 ton/ha). Dukungan pemerintah berupa penyuluhan sudah dirasakan dengan baik oleh petani di semua kabupaten. Sedangkan untuk dukungan pemerintah berupa dukungan regulasi, sarana dan prasarana budidaya padi, dukungan modal usahatani dan dukungan fasilitas kelitbangan sudah dirasakan cukup baik oleh petani di masing-masing 4 kabupaten yaitu Tasikmalaya, Bekasi, Karawang dan Bandung. Namun mayoritas petani di Indramayu dan Sukabumi menilai bentuk dukungan pemerintah selain penyuluhan belum mereka rasakan dengan baik. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa dukungan regulasi, sarana dan prasarana budidaya padi, dan fasilitas kelitbangan berpengaruh nyata dan positif terhadap produktivitas padi di Jawa Barat. Hal ini berarti bahwa untuk meningkatkan produktivitas padi di Jawa Barat maka pemerintah harus berfokus terutama pada peningkatan peran dari ke-3 indikator yang signifikan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. S. S., Fahmid, I. M., Salman, D., Naping, H., Agustian, A., Perdana, R. P., Muslim, C., & Darwis, V. (2021). The performance of the distribution and use of improved varieties of rice in West Java Province. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 892(1), 12025.
- Alvin, T., & Arifin, A. Z. (2023). Pengaruh inovasi pengguna dan dukungan pemerintah terhadap niat UMKM mengadopsi teknologi keuangan. *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Kewirausahaan*, 7(3), 549–558.
- Hamsa, K. R., & Umesh, K. B. (2019). Farm level capital formation in agriculture: pattern and sources of investment in Southern Karnataka. *Economic Affairs*, 64(2), 367–375.
- Jamil, A., & Chairunnisya, R. A. (2023). Building Resilience: Addressing Climate Change Impacts on Rice Production Based on Agricultural Infrastructure in West Java Province, Indonesia. *E3S Web of Conferences*, 425, 5001.
- Juswadi, J., & Sumarna, P. (2023). Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Pertanian dan Korelasinya dengan Usia Petani di Jawa Barat. *Paspalum: Jurnal Ilmiah Pertanian*, 11(2), 361–369.
- Kuncoro, H. (2023). *Statistika Deskriptif Untuk Analisis Ekonomi*. Bumi Aksara.
- Kuswardhani, N., Soni, P., & Shivakoti, G. P. (2014). Development protected cultivation in horticulture product: Feasibility analysis in West Java Province. *Advanced Science Engineering Information Technology*, 4(5), 66–70.
- Liesdiana, F., Laksemi, N. P. S. T., Fachria, R., Nursaadah, S., Hoesen, Y. A., I'lanul, A. A. Z., & Yustiana, Y. (2019). Technology adaptation to climate change in level producers rice in West Java. *3BIO: Journal of Biological Science, Technology and Management*, 1(1), 22.
- Maryani, A., Haryanto, Y., & Anwarudin, O. (2017). Strategy of agricultural extension to improve participation of the farmers in special effort in increasing rice production. *International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR)*, 36(4), 163–174.
- Mishbah, M. A., Najib, A., Najib, A. K., Abdillah, A. F., Kholis, M. N., Al-Haq, M. M., Najih, M., Qurtubi, M., Zain, R. F., & Rouf, A. (2021). Pendampingan Kelompok Tani Desa Sidomukti Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban: Kajian Partisipatory Action Research (PAR). *LOYALITAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 145–170.
- Mucharam, I., Rustiadi, E., Fauzi, A., & Harianto. (2020). *Assessment of rice farming sustainability: evidence from Indonesia provincial data*.
- Mulyaqin, T., Astuti, Y., & Haryani, D. (2016). Faktor yang mempengaruhi petani padi dalam pemanfaatan sumber permodalan: studi kasus di Kabupaten Serang Provinsi Banten. *Seminar Nasional BPTP*, 2(1), 2016.
- Pasaribu, S. M., Sayaka, B., de Braw, A., Suhartini, S. H., & Dabukke, F. B. M. (2021). Agricultural value chain financing: a case study in Ciamis District, West Java Province. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 892(1),

- 12095.
- Prakoso, I. A., Winarno, S. T., & Nurhadi, E. (2023). KELAYAKAN USAHATANI PADI VARIETAS CIHERANG (Studi Kasus Desa Kedayang Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik). *Jurnal Pertanian Agros*, 25(3), 3191–3198.
- Rasmikayati, E. (2017). *Statistika Non Parametrik untuk Bidang Agribisnis, Ekonomi, dan Sosial (1st ed.)*. Unpad Press.
- Rasmikayati, E., Djuwendah, E., Mukti, G. W., & Saefudin, B. R. (2017). Analisis strategi adaptasi terhadap perubahan iklim pada petani padi di jawa barat. In *Prosiding Seminar Nasional Mitigasi Dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim Di Indonesia*.
- Rasmikayati, E., Saefudin, B. R., Rochdiani, D., & Natawidjaja, R. S. (2020). Dinamika Respon Mitigasi Petani Padi di Jawa Barat dalam Menghadapi Dampak Perubahan Iklim serta Kaitannya dengan Pendapatan Usaha Tani. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 8(3), 247-260.
- Rasmikayati, E., Wiyono, S. N., & Saefudin, B. R. (2024). KETERKAITAN PERILAKU BERKELOMPOK PETANI DENGAN PRODUKTIFITAS PADI (PERBANDINGAN KASUS DI KARAWANG DAN INDRAMAYU). *Jurnal Pertanian Agros*, 26(2), 798-810.
- Sa'adah, L. (2021). *Statistik Inferensial*. LPPM Universitas KH. A. Wahab Hasbullah.
<https://books.google.co.id/books?id=o5kwEAAAQBAJ>
- Saefudin, B. R., Rasmikayati, E., Dwirayani, D., Awaliyah, F., & Rachmah, A. R. A. (2020). Fenomena Peralihan Usahatani Mangga Ke Padi Di Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. *Paradigma Agribisnis*, 2(2), 21-33.
- Saefudin, B. R., Sendjaja, T. P., Rochdiani, D., Natawidjaja, R. S., & Rasmikayati, E. (2021). Analisis Tingkat Bahaya, Kerentanan Dan Risiko Perubahan Iklim: Studi Komparatif Petani Padi Jawa Barat Dan Jawa Timur. *Mimbar Agribisnis*, 7(1), 660-675.
- Santoso, S. (2018). *Mahir Statistik Multivariat dengan SPSS*. Elex Media Komputindo.
<https://books.google.co.id/books?id=6CVtDwAAQBAJ>
- Setiyanto, A., Pabuayon, I. M., Quicoy, C. B., Camacho, J. V, & Depositario, D. P. T. (2021). Competitiveness effect of the UPSUS Program on rice production in West Java Province, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 653(1), 12010.
- Shafitri, N., Zulham, A., & Muawanah, U. (2020). Masyarakat pesisir dan perilakunya terhadap jaringan usaha perikanan: Studi kasus daerah perbatasan di Kabupaten Nunukan. *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 6(1), 61–71.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Trilestari, E. W., & Kirana, C. A. D. (2020). Collaborative Governance dalam Pembangunan Sektor Pertanian di Kabupaten Bandung. *Perspektif*, 9(1), 55–65.

Wicaksono, E. (2014). The impact of agricultural credit on rice productivity. *International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology*, 4(5), 322.

Yazid, F., Kamello, T., Nasution, Y., & Ikhsan, E. (2021). Sharia based economics in support of Indonesia's sustainable agricultural sector. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 782(3), 32040.